

**PEMBERDAYAAN UMKM LOKAL MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT**

Syafira Rizki Arsyad¹, Darmawan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

rizkisyafira7@gmail.com¹, darmawan@uin-suka.ac.id²

Abstrak

Peranan UMKM sangat penting dan lembaga keuangan syariah juga sangat penting keduanya memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain. Melalui metode analisis deskriptif kualitatif diharapkan mampu memperjelas peranan lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan dan mengatasi persoalan kemiskinan. Untuk itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan LKS terhadap UMKM dan peranan LKS terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Melalui program kredit mikro yang dimiliki lembaga keuangan syariah diharapkan mereka yang masih dalam kategori belum memenuhi kriteria peminjaman tetap bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan kemampuan dari usaha tersebut serta berbagai layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk mengembangkan UMKM lokal juga surupa kemitraan, perluasan pembiayaan, pengembangan relasi dan pelatihan atau pendampingan mengenai kemampuan mengelola usaha. 2) Peranan lembaga keuangan syariah dalam mengentaskan kemiskinan adalah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada sehingga masyarakat diminta untuk membuat usaha-usaha tertentu yang akan didampingi oleh lembaga keuangan tersebut sehingga tercipta masyarakat yang mandiri dan memiliki kemampuan daya saing.

Kata Kunci: UMKM Lokal, Lembaga Keuangan Syariah, Kemiskinan.

Abstract

The role of MSMEs is very important and Islamic financial institutions are also very important, both of which are related and dependent on each other. Through the qualitative descriptive analysis method, it is hoped that it will be able to clarify the role of Islamic financial institutions in empowering and overcoming poverty problems. For this reason, the aim of this research is to find out the role of LKS on MSMEs and the role of LKS on poverty. The research results show 1) Through the micro credit program owned by sharia financial institutions, it is hoped that those who are still in the category of not meeting the lending criteria can still get loans according to the capabilities of the business as well as various services provided by financial institutions to develop local MSMEs as well as partnerships, expanding financing, developing relationships and training or mentoring regarding business management skills. 2) The role of sharia financial institutions in alleviating poverty is to encourage people to take advantage of existing local potentials so that people are asked to create certain businesses which will be accompanied by these financial institutions so as to create communities that are independent and have competitive capabilities.

Keywords: Local MSMEs, Sharia Financial Institutions, Poverty.

PENDAHULUAN

Setiap lokasi ataupun daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda tergantung oleh daerah tersebut. Apalagi kita ketahui bahwa setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami perbedaan setiap daerah (Wahab & Mahdiya, 2023). Untuk itu perlu adanya perencanaan mengenai pembangunan dan pemerintah perlu memahami mengenai kondisi dari daerah tersebut secara faktor ekonomi sosial maupun kondisi fisik. Melalui pemahaman yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah maka muncul strategi yang paling sesuai untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa setiap daerah belum tentu memiliki strategi yang sama dengan daerah lain karena kondisi yang dimiliki berbeda-beda baik itu jangka pendek maupun jangka panjangnya. Setiap pembangunan perekonomian tujuan utamanya adalah meningkatkan berbagai macam jumlah maupun peluang bagi masyarakat sekitar. Tujuan ini bisa tercapai apabila semua pihak termasuk juga pemerintah daerah maupun masyarakat memiliki inisiatif yang sama dan bekerja sama membangun ekonomi secara nasional.

Selain itu juga perlu adanya perancangan maupun pemahaman mengenai pendekatan tertentu guna membangun ekonomi sebuah daerah. Perkataan ini masuk dalam teori pembangunan Daerah yang dikembangkan untuk mencapai pembangunan ekonomi daerah yang paling ideal. Sesuai dengan teori pembangunan ekonomi daerah salah satu cara yang bisa memaksimalkan pembangunan perekonomian sebuah daerah tertentu itu melalui usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kontribusi yang dihasilkan dari UMKM lokal masyarakat setempat itu cukup besar karena kita ketahui bahwa melalui UMKM perekonomian secara nasional mampu bergerak dengan baik (Kaswinata et al., 2023). Selain itu juga UMKM ini menjadi tulang punggung dari perekonomian secara nasional. Kontribusinya yang cukup besar bagi perekonomian ternyata melalui pengembangan UMKM lokal tenaga kerja yang ada di sekitar daerah tersebut bisa terserap dengan cukup besar dan perkembangannya juga fleksibilitasnya cukup tinggi serta bersaing perlu adanya permodalan yang cukup besar.

Secara umum peranan dari UMKM itu menjadi salah satu sarana untuk pemeratakan perekonomian masyarakat kecil, selain itu juga bisa memberikan kontribusi yang positif untuk menekan angka kemiskinan serta menjadikan penghasilan dalam bentuk devisa (Fawaid &

Fatmala, 2020). Kontribusi positif ini tentu saja perlu dikembangkan karena apabila ini berada di setiap daerah maka daerah tersebut mampu meningkatkan ekonomi masyarakat kecil dan mengatasi beragam permasalahan perekonomian termasuk juga kemiskinan. Secara umum jumlah pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia itu sebesar 64,2 juta dengan kontribusi utamanya adalah menyumbang jumlah PDB sebesar 61,07% atau sekitar Rp. 8.573 triliun. Jumlah ini cukup besar pengaruhnya bagi perekonomian secara nasional. Apalagi hal tersebut menyebabkan sebanyak 97% dari total angkatan kerja yang ada itu bisa diserap untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan serta sebanyak 60,4% investasi bisa masuk dan tertarik untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya dirasakan oleh satu pihak saja namun dirasakan oleh semua pihak.

Sesuai dengan informasi geografis menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,61%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini termasuk dalam kategori yang sudah baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini memberikan bukti bahwa masyarakat di Pangandaran terutama di Jawa Barat mengalami kondisi perkembangan konsumsi maupun produksi yang cukup baik. Secara keseluruhan UMKM lokal menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan dan dikembangkan. Sesuai dengan data pelaku UMKM yang berkontribusi sangat besar itu adalah mereka yang bergerak dalam bidang pengolahan baik itu pengolahan hasil pertanian maupun pengolahan hasil perikanan. Sesuai dengan kondisi yang ada pertanian menyumbang PDRB yang cukup besar bagi kabupaten Pangandaran karena hal ini terjadi pengaruh dari luas lahan yang dimiliki oleh para petani serta kondisi ini dipengaruhi juga oleh besaran hasil pertanian yang didapatkan oleh para petani. Pertanian yang menghasilkan paling besar itu adalah tanaman yang berkaitan dengan tanaman pangan. Komoditas yang paling tinggi dihasilkan di kabupaten Pangandaran itu adalah sayuran ketimun, cabe besar, kangkung, cabe rawit, kacang panjang dan juga semangka. Komoditas tersebut jumlahnya cukup besar di kabupaten Pangandaran dan banyak menyumbang penghasilan bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya pada bagian perikanan masyarakat juga banyak yang bekerja sebagai nelayan maupun orang-orang yang bekerja dalam pengolahan ikan. Komoditas utama yang dihasilkan masyarakat itu adalah ikan nila dan di sana terbesar jumlahnya hampir keseluruhan masyarakat membudidayakan ikan nila. Kemudian masyarakat di sana kebanyakan membudidayakan ikan

pada tempat-tempat tertentu dengan jumlah pelaku usaha tersebut 5844 pelaku usaha sedangkan mereka yang bekerja sebagai nelayan dengan menangkap ikan secara langsung sebanyak 1416 pelaku usaha. Jumlah ini tentu saja cukup besar dan banyak masyarakat yang bekerja dalam hal pengolahan ikan maupun pembudidaya. Sesuai dengan kondisi tersebut maka pemerintah kabupaten Pangandaran selalu mengedepankan strategi pembangunan Daerah yang menguntungkan bagi semua pihak. Langkah yang paling utama dilakukan adalah memotivasi dan memberikan semangat para UMKM supaya bisa berkembang dan menunjukkan daya saingnya sehingga bisa memiliki produk-produk yang mampu diserap di pasar nasional maupun pasar domestik dan juga pasar internasional (Nasution & Marliyah, 2023). Pemerintah daerah juga telah melakukan strategi untuk memasukkan produk-produk lokal ke dalam pasar-pasar menengah ke bawah maupun menengah ke atas dengan bekerja sama dengan Alfamart maupun Indomaret atau swalayan besar lainnya.

Langkah ini dirasa menjadi salah satu motivasi yang akan dibangun oleh pemerintah supaya masyarakat mampu menjual produknya secara lebih luas. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas maka pemerintah menerapkan berbagai kegiatan untuk mengembangkan produk lokal dan daya beli masyarakat. Melalui langkah pemerintah yang selalu memanfaatkan produk lokal dan memasukkan kegiatan-kegiatan skala nasional maupun internasional yang ada di kabupaten Pangandaran sehingga membuat produk-produk disana dikenal luas oleh masyarakat dan jumlah produksinya juga mengalami peningkatan. Selain itu juga pemerintah juga mendorong lembaga keuangan mikro maupun lembaga keuangan syariah harus mampu memberikan dorongan berupa permodalan maupun pendanaan supaya mereka bisa berkembang lebih baik dan meningkatkan tingkat produksinya. Selain itu juga permasalahan utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah adalah berkaitan dengan modal yang terbatas, kualitas produk yang masih rendah serta minimnya penguasaan ilmu manajemen maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan usaha (Suaidah & Arjun, 2023). Permasalahan ini akan mampu diatasi dengan baik apabila adanya dorongan dari berbagai macam lembaga keuangan.

Apalagi persoalan yang dihadapi oleh para UMKM adalah berkaitan dengan produktivitas, kualitas produk dan nilai tambah yang dihasilkan dari produk tersebut. Untuk itu melalui lembaga keuangan masyarakat bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan bisa memberikan pengembangan usaha yang akan berdampak positif bagi masyarakat secara

keseluruhan di kabupaten Pangandaran. Selain permasalahan UMKM pemerintah kabupaten Pangandaran juga mengalami permasalahan mengenai tingkat kemiskinan masyarakat. Sesuai dengan data kemiskinan di tahun 2021 hingga tahun 2023 tingkat kemiskinan yang dihasilkan mengalami tingkatan yang selalu meningkat. Pada tahun 2021 sebanyak 394.101 orang kemudian berkembang di tahun 2022 sebanyak 411.174 orang dan berkembang lagi di tahun 2023 sebanyak 447.242 orang mengalami kemiskinan di kabupaten Pangandaran. Selain itu juga angka kemiskinan juga bertambah setiap tahun di provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2021 sebanyak 427.402 orang kemudian di tahun 2022 sebanyak 452.580 orang dan di tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 495.229 orang. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang dialami oleh setiap provinsi terutama provinsi Jawa Barat dan juga kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angka kemiskinan ini menjadi hal yang perlu diperhatikan supaya mampu memberikan solusi efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya peranan dari lembaga keuangan syariah yang mengedepankan nilai-nilai syariah dan juga aturan Islam dalam ekonomi. Pengembangan ekonomi Islam menjadi hal yang baik karena setiap tindakan yang dilakukan berprinsip pada moral maupun ketuhanan sehingga hal yang halal maupun hal-hal yang amanah dan juga baik itu dikedepankan guna mencapai tingkatan yang saling mencintai maupun menciptakan persaudaraan (Awwalunnisa, 2021). Melalui lembaga keuangan syariah tersebut masyarakat yang membutuhkan pendanaan mampu diberikan layanan fasilitas pendanaan lebih baik dan mereka yang memiliki kelebihan dana bisa menyalurkan dananya dan mendapatkan sejumlah keuntungan.

Lembaga keuangan micro maupun lembaga keuangan syariah menjadi salah satu lembaga yang penting untuk dikembangkan oleh pemerintah dan untuk mendorong masyarakat secara umum karena penggerak dari berbagai macam aktivitas usaha itu ditopang oleh lembaga keuangan mikro maupun Syariah (Susilawati, 2023). Untuk itu peranan dari lembaga keuangan syariah menjadi lembaga yang sangat penting dan strategis dalam memajukan maupun mengembangkan sektor-sektor perekonomian masyarakat kecil maupun masyarakat menengah. Pengembangan pendanaan maupun dukungan lembaga keuangan itu bukan hanya berkaitan dengan tindakan yang sifatnya konvensional namun sudah mengarah kepada kolaborasi yang baik sesuai dengan sifat operasional maupun prinsip ekonomi syariah yang sudah disesuaikan dengan uji yang ada (Az-zahra et al., 2022). Hali ini ditunjukkan pada hasil

yang didapatkan bahwa selama masa pandemi yang terjadi tahun lalu lembaga keuangan syariah telah mampu memberdayakan masyarakat yang menjadi pelaku usaha kecil maupun menengah bisa tetap mempertahankan usahanya dan mengembangkannya hingga sekarang. Untuk itu perlu adanya optimalisasi maupun pemanfaatan secara menyeluruh mengenai produk dari layanan keuangan dan juga lembaga keuangan mikro supaya masyarakat bisa mendapatkan pendanaan dengan baik serta mencapai tingkat produktivitas yang diharapkan.

Sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan mengenai beberapa temuan hasil penelitian peranan lembaga keuangan syariah terhadap UMKM maupun pengentasan kemiskinan maka dapat dinyatakan dalam beberapa informasi. Sesuai dengan penjelasan dari Ridwan menyatakan bahwa adanya lembaga keuangan syariah menyebabkan UMKM mudah dalam mendapatkan pendanaan sehingga pengembangan UMKM lokal bisa berlangsung dengan baik melalui program kredit usaha rakyat, serta hal ini bisa mengembangkan usaha dan menurunkan angka kemiskinan (Bahagia & Ridwan, 2022). Pengembangan yang dilakukan mereka adalah memanfaatkan kredit usaha rakyat dengan sistem yang dinamakan bagi hasil sehingga memudahkan masyarakat dan memberikan keleluasaan masyarakat untuk menyesuaikan pembagian hasil yang diinginkan kedua belah pihak. Peran dari BMT sebagai lembaga keuangan syariah ternyata memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam hal peningkatan produktivitas para pelaku usaha serta bisa melakukan peningkatan usaha dan mendukung perkembangan perekonomian daerah tertentu termasuk juga pesisir maupun daerah-daerah tertinggal (Pratama, 2023). Untuk itu daerah-daerah yang masih belum memiliki produktivitas yang baik dapat dijangkau oleh lembaga keuangan berupa BMT. Sesuai dengan hasil penelitian menyatakan bahwa peranan dari lembaga keuangan mikro Syariah atau BMT itu sangat baik dan berpengaruh positif mampu memberdayakan pelaku usaha UMKM untuk terus berkembang dan mencapai tingkat produktivitasnya secara maksimal (Cahyono et al., 2024).

Lembaga keuangan syariah juga bisa menurunkan angka kemiskinan apabila hal tersebut didasari atas kerjasama maupun kolaborasi yang baik pada semua pihak supaya pendanaan yang diberikan bisa menjadi sebuah usaha dan menghasilkan penghasilan bagi masyarakat (Awwalunnisa, 2021). Untuk itu perlu adanya kolaborasi yang baik antara pihak lembaga keuangan dengan para pelaku usaha untuk terus mengembangkan kemampuan usaha sehingga terserap banyak tenaga kerja yang ada dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Untuk itu

secara keseluruhan menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah bisa berdampak positif bagi daerah-daerah yang tertinggal maupun daerah pesisir sehingga ekonominya bisa terbangun dengan baik dan masyarakatnya bisa keluar dari zona kemiskinan. Sesuai dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan UMKM lokal yang ada di kabupaten Pangandaran dan untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga keuangan syariah terhadap pengentasan angka kemiskinan yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai dampak yang dihasilkan apabila masyarakat berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan ini memanfaatkan metode analisis yang berupa analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan secara lebih mendalam mengenai topik yang akan diteliti sehingga hasil penelitian mengacu kepada data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian tersebut (Sugiyono, 2019). Metode yang digunakan ini akan memanfaatkan tahapan mengumpulkan berbagai macam bahan pustaka yang didapatkan dari berbagai macam sumber-sumber hasil penelitian dan data-data lainnya. Kemudian prosesnya dilakukan dengan membaca maupun melakukan dokumentasi berbagai macam bahan maupun sumber-sumber penelitian. Untuk itu pendekatan ini akan memanfaatkan berbagai macam sumber data terutama data sekunder yang didapatkan dari beberapa macam literatur termasuk juga buku maupun jurnal yang membahas mengenai topik tersebut. Melalui analisis deskriptif kualitatif penelitian ini tidak hanya fokus pada sudut pandang deskriptifnya saja namun juga akan membahas lebih detail dan membahas lebih mendalam mengenai aspek-aspek deskriptif maupun aspek-aspek lainnya (Arikunto, 2019). Sehingga didapatkan informasi yang runtut dan baik untuk menjawab berbagai macam persoalan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan menyatakan bahwa perkembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat termasuk juga UMKM lokal itu semakin lama semakin berkembang dengan pesat. Namun di sisi lain permodalan yang mereka butuhkan juga begitu besar sehingga melalui adanya layanan keuangan mikro maupun layanan keuangan syariah akan mampu memberikan peningkatan dan akan memberikan intervensi yang lebih baik untuk

mengatasi berbagai macam persoalan yang dihadapi termasuk juga melawan kemiskinan. Melalui peranan lembaga keuangan syariah banyak UMKM yang terbantu secara permodalan dan kemudahan mendapatkan akses layanan keuangan. Hal tersebut memberikan dampak positif berkembangnya lapangan usaha sehingga banyak masyarakat yang mendapatkan pekerjaan serta mendapatkan penghasilan sehingga kemiskinan yang dialami oleh masyarakat semakin menurun efek dari adanya dorongan masyarakat menengah ke bawah mendapatkan pelayanan keuangan dengan baik.

Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM

Sesuai dengan penjelasan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM usaha mikro itu merupakan sebuah usaha yang berkaitan dengan produktivitas dengan miliknya perorangan maupun milik dari sebuah badan usaha tertentu namun sifatnya perorangan dengan kriterianya adalah permodalannya kisaran 50 juta dan omset yang didapatkan berkaitan dengan 300 juta selama 1 bulan itu maksimalnya (Yogasnumurti et al., 2023). Jenis UMKM ternyata juga beragam mereka bisa juga bergerak dalam bidang manufaktur, bergerak dalam bidang pertanian, bergerak dalam bidang distribusi ataupun pelayanan penjualan produk, bisnis pertokoan atau eceran dan bisnis jasa. Pada tindakan yang dilakukan para UMKM untuk mencapai keberhasilan usaha maka diperlukan kerjasama yang baik antar semua pihak terutama yang paling mendasar adalah peran dari lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah untuk memberikan kemudahan pinjaman atau pembiayaan kepada UMKM. Selanjutnya peran dari pemerintah dan juga perbankan untuk memberikan izin usaha maupun menciptakan iklim yang kondusif demi tercapainya daya beli yang maksimum. Selain itu juga berbagai pihak yang berkaitan dengan mitra-mitra usaha serta pihak pengawas dan penyedia tenaga kerja juga berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.

Sebagai lembaga keuangan syariah tentu saja harus memperhatikan kondisi keterjangkauan masyarakat terhadap perbankan tersebut. Supaya kondisi riil keuangan bisa betul-betul diserap masyarakat dengan baik walaupun secara kebijakan dan aturan perkembangan keuangan tidak berkembang dengan baik. Apabila tidak ada kondisi lembaga yang terdekat dengan masyarakat maka pembiayaan pembiayaan sulit untuk dilakukan. Selain itu juga langkah yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan pengembangan UMKM lokal daerah pesisir maupun daerah tertinggal adalah lembaga keuangan syariah perlu

memperhatikan program kemitraan yang nantinya akan menjadi mitra dari lembaga keuangan tersebut dan ini berlaku bagi usaha yang belum memenuhi kriteria dan belum bisa memenuhi administrasi peminjaman modal. Bagi mereka yang masih dalam kategori ini yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan adalah memaksimalkan program kemitraan (Lubis, 2016). Kemudian mereka akan diarahkan untuk mendapatkan program-program tambahan dari lembaga keuangan mikro untuk memaksimalkan pembiayaan syariah yang dilakukannya. Pelaksanaan program yang dikembangkan untuk membiaya Syariah itu ditujukan kepada mereka yang masuk dalam kategori UMKM nya masih dalam skala kecil, mereka masih memiliki anggaran yang terbatas dan kondisinya secara badan hukum belum berbadan hukum namun letak usahanya jauh dan secara administrasi mereka belum bisa memenuhi administrasi peminjaman keuangan. Sehingga kondisi kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi mereka dalam mendapatkan pinjaman modal dari bank syariah.

Untuk itu melalui program perluasan pembiayaan ini diharapkan mereka bisa mendapatkan permodalan dengan baik walaupun secara administrasi dan juga angkutan belum sesuai dengan ketentuan perbankan. Sehingga dari tindakan ini UMKM bisa mendapatkan relasi yang baik dan bisa memperluas pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ini berdasarkan prinsip bagi hasil yang tentu saja akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain pembiayaan permodalan setiap UMKM juga perlu untuk diberikan penyuluhan maupun pendampingan mengenai manajemen manajemen yang bisa meningkatkan kemajuan produktivitas dan kemajuan penghasilan dari pelaku usaha. Lembaga keuangan syariah juga memiliki peranan yang cukup penting dalam membagikan informasi dalam manajemen pelaksanaan usaha. Beberapa hal yang berkaitan dengan hal ini adalah membina kemampuan-kemampuan dan juga pendampingan teknik termasuk standarisasi, pemanfaatan sistem IT, pemasaran produk, maupun manajemen pengelolaan usaha (Lubis, 2016). Langkah ini dirasa penuh karena banyak masyarakat pelaku usaha terutama memiliki produk tertentu kemudian terbatas karena posisi mereka di daerah pesisir maupun Daerah tertinggal apabila tanpa adanya pendampingan dan pelatihan maka pembiayaan yang didapatkan mereka hanya akan mengakibatkan dampak negatif terutama adalah ketidaktepatan atau ketidaksesuaian pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketidaktepatan pengelolaan pembiayaan ini akan berdampak kepada permasalahan baru sehingga permasalahan pemberdayaan UMKM lokal tidak bisa tercapai

dengan maksimal namun akan melibatkan permasalahan baru yang muncul dari adanya kegiatan tersebut. Selain itu juga akan diberikan sejumlah pendampingan teknologi supaya kualitas produk yang dihasilkan dan juga kuantitasnya bisa memenuhi kebutuhan pasar yang ada dan UMKM akan terus berkembang apabila memenuhi kriteria-kriteria produk yang diharapkan pasar. Langkah-langkah tersebut akan dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah untuk memajukan dan memberdayakan UMKM lokal.

Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kemiskinan

Persoalan utama yang dihadapi oleh setiap negara di dunia maupun di setiap provinsi maupun kabupaten adalah mengenai kemiskinan. Kemiskinan itu merupakan sebuah permasalahan yang sangat mendasar sehingga akan berdampak pada hal-hal negatif berupa masyarakat yang mengalami gizi buruk atau kelaparan, terganggunya kesehatan maupun menurunnya tingkat kesehatan maupun pendidikan (Nasution & Marliyah, 2023). Persoalan ini tentu saja sangat berdampak kepada masyarakat dan mempengaruhi indikator tingkat keberhasilan dalam pembangunan secara nasional. Indikator ini menjelaskan bahwa hal yang perlu diperhatikan untuk mampu berhasil membangun secara nasional adalah mengentaskan angka kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Ketika angka atau tingkat kemiskinan yang dialami atau terjadi di lingkungan masyarakat mampu menurun maka hal ini menjadi bukti bahwa pembangunan secara nasional mampu tercapai dengan baik. Kondisi ini ditunjukkan dengan perubahan-perubahan yang signifikan dalam hal kondisi masyarakat kesehatan maupun pendidikan.

Pemerintah sebagai pihak yang membuat kebijakan maka perlu mengantisipasi adanya peningkatan jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Melalui kebijakan tersebut diharapkan jumlah masyarakat mampu menurun walaupun demikian langkah demi langkah sudah dilakukan namun tetap angka kemiskinan mengalami peningkatan atau bahkan tetap ada kemiskinan. Peranan pemerintah sudah cukup banyak untuk mengatasi persoalan kemiskinan melalui berbagai macam regulasi, subsidi maupun bantuan-bantuan lain yang mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam merubah kehidupannya (Suaidah & Arjun, 2023). Namun tetap saja hal tersebut tidak mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan yang terjadi di sebuah daerah tertentu.

Masalah kemiskinan yang terjadi dalam sudut pandang ekonomi Islam itu menjadi hal yang harus diantisipasi atau wajib dituntaskan permasalahan tersebut (Awwalunnisa, 2021).

Sesuai dengan ranah lembaga keuangan syariah maka hal yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan di sebuah daerah terutama daerah-daerah yang tertinggal adalah lembaga tersebut harus memastikan terjadinya kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan kepada masyarakat dengan berbagai macam tindakan termasuk juga mengembangkan potensi-potensi lokal serta lembaga tersebut perlu mengembangkan pengembangan sosial atau memberdayakan masyarakat untuk membuat sebuah kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi keunggulan dari daerah tersebut (Pratama, 2023). Peranan dari lembaga keuangan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat itu diharapkan bisa mengembangkan masyarakat menjadi masyarakat yang produktif. Langkah ini dirasa penting karena melalui pemberdayaan mereka bisa mulai memiliki ide maupun gagasan untuk berkembang memiliki usaha dan meningkatkan kemampuan maupun kemandirian pada setiap masyarakat.

Langkah ini perlu dilakukan atas dukungan dari berbagai macam pihak termasuk juga pemerintah maupun masyarakat serta lembaga-lembaga yang terkait supaya angka kemiskinan yang ada di sebuah daerah tersebut bisa mengalami penurunan dan menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemandirian cukup tinggi sehingga iklim pengembangan sumber daya manusia dapat tercapai dengan baik. Untuk itu perlu adanya bantuan-bantuan pendanaan maupun pelatihan serta pembangunan berbagai macam sarana prasarana untuk menunjang kegiatan sosial maupun kehidupan masyarakat serta melindungi masyarakat dari berbagai macam persaingan yang tidak seimbang maupun kemitraan yang tidak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (Berliana & Suri, 2023). Secara pandangan lembaga keuangan syariah atau ekonomi Islam kekayaan yang dimiliki oleh setiap daerah itu wajib untuk dikembangkan dan diinvestasikan kepada setiap masyarakat guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Sebagai lembaga keuangan syariah lembaga ini bergerak dalam bidang keuangan yang memiliki fungsi utama dalam menyalurkan dana-dana pada masyarakat dan menghimpun dana yang dimiliki masyarakat untuk digunakan oleh masyarakat lain yang membutuhkan pendanaan (Kaswinata et al., 2023). Sehingga masyarakat yang membutuhkan uang tunai mampu dengan mudahnya mendapatkan uang tunai tersebut. Melalui lembaga keuangan syariah masyarakat tidak dihadapkan dengan besaran bunga yang terjadi pada lembaga keuangan perbankan konvensional karena ini sifatnya adalah sistem non bunga atau bagi hasil.

Upaya yang akan dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui memperluas akses yang diperlukan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah dalam hal permodalan dan keuangan. Supaya masyarakat yang memiliki usaha bukan hanya mengambil pendanaan dari bank konvensional dan juga koperasi namun juga bisa mengarah kepada lembaga keuangan syariah lainnya. Apalagi lembaga keuangan syariah telah memiliki produk keuangan yang bernama pembiayaan mudharabah yang ditujukan kepada mereka yang memiliki usaha dan untuk kegiatan produktivitas (Pudyastuti et al., 2022). Untuk itu sehingga UMKM yang dimiliki oleh masyarakat setempat bisa berkembang karena adanya penyertaan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Melalui pengembangan UMKM lokal Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang diterima bekerja di usaha tersebut sehingga lapangan usaha terbuka dan pendapatan masyarakat semakin meningkat serta mengurangi angka pengangguran maupun angka kemiskinan (Fawaid & Fatmala, 2020). Untuk itu diharapkan pembiayaan mudharabah yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah mampu mencapai tujuan utamanya memajukan UMKM yang ada di sekitar daerah tersebut sehingga tercipta kegiatan perekonomian yang semakin baik. Apalagi kita tahu bahwa lembaga ini merupakan salah satu alternatif lembaga yang bisa kita dapatkan pendanaannya dengan syarat yang lebih mudah dan sesuai dengan kemampuan dari UMKM. Hal ini sesuai dengan penjelasan bahwa lembaga alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha adalah lembaga keuangan mikro terutama keuangan syariah (Pratama, 2023).

Lembaga keuangan syariah yang bisa dimanfaatkan para pelaku usaha bisa berupa perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro seperti BMT. BMT atau Baitul mal watamwil merupakan sebuah lembaga yang mendukung ekonomi dari masyarakat kecil dengan landasan utama adalah aturan Syariah Islam sehingga fungsi utamanya adalah pengumpulan dana zakat maupun infaq shodaqoh maupun wakaf serta sumber dana sosial lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat (Maulana & Muchtar, 2024). Kemudian berkembang menjadi ke arah simpan pinjam dan penghimpunan dana dari berbagai masyarakat untuk mencapai pembiayaan sektor ekonomi yang mengedepankan kehalalan maupun keuntungan kedua belah pihak. Apalagi kita tahu bahwa perkembangan BMT maupun lembaga keuangan seperti kspps maupun lembaga keuangan mikro Syariah lainnya di kabupaten Pangandaran jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan banyak masyarakat yang telah memanfaatkan layanan keuangan mikro Syariah tersebut untuk permodalan dan

mengembangkan usaha. Pada masyarakat yang ada di kabupaten Pangandaran BMT menjadi salah satu lembaga alternatif yang dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mendapatkan permodalan usahanya supaya bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak positif bagi mereka. Lokasi BMT yang cukup dekat dengan para nasabahnya bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat yang dalam kategori miskin maupun menangkap bahwa sehingga kemiskinan yang ada di kabupaten Pangandaran bisa diminimalkan. Untuk itu peranan dari lembaga keuangan mikro syariah dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan permodalan sehingga masyarakat bisa memiliki usaha dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya serta membuka lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat lainnya.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan yang didapatkan mengenai peranan dari lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan rangkaian lokal yang ada di daerah pesisir dan mengentaskan kemiskinan maka kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Peranan UMKM sangat penting dan lembaga keuangan syariah juga sangat penting keduanya memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain, melalui program kredit mikro yang dimiliki lembaga keuangan syariah diharapkan mereka yang masih dalam kategori belum memenuhi kriteria peminjaman tetap bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan kemampuan dari usaha tersebut serta berbagai layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk mengembangkan UMKM lokal juga berupa kemitraan, perluasan pembiayaan, pengembangan relasi dan pelatihan atau pendampingan mengenai kemampuan mengelola usaha. 2) peranan lembaga keuangan syariah dalam mengentaskan kemiskinan adalah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada sehingga masyarakat diminta untuk membuat usaha-usaha tertentu yang akan didampingi oleh lembaga keuangan tersebut sehingga tercipta masyarakat yang mandiri dan memiliki kemampuan daya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Awwalunnisa, N. (2021). PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. *Iqtishaduna*, 12(1), 29–47.

- Az-zahra, F., Absari, R. L., & Langit, M. S. (2022). PERANAN BMT TERHADAP KEMAJUAN USAHA KECIL DI JAWA TENGAH. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2), 1–7.
- Bahagia, R., & Ridwan. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3(1), 97–107.
- Berliana, A., & Suri, A. A. (2023). ANALISIS PEMBIAYAAN UMKM PADA BANK SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 850–863.
- Cahyono, H., Sutantri, & Mala, I. K. (2024). Pengembangan Model Bisnis Inklusif Berbasis Digital Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Maal Wal Tamwil (BMT). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1326–1341.
- Fawaid, A., & Fatmala, E. (2020). HOME INDUSTRY SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DALAM MENINGKATKAN FINANCIAL REVENUES MASYARAKAT. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 14(1), 100–128. <https://doi.org/10.35931/aq.v14i1.342>
- Kaswinata, Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Syahputra, A. (2023). Signifikansi peranan umkm dalam pembangunan ekonomi di kota medan dalam prespektif syariah. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(2), 718–728.
- Lubis, D. S. (2016). Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan Oleh: Delima Sari Lubis Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan. *Jurnal At-Tijaroh*, 2(2), 270–285.
- Maulana, A., & Muchtar, M. (2024). Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Nelayan Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat). *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 781–791.
- Nasution, R., & Marliyah. (2023). ANALISIS PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI KECAMATAN PULAU RAKYAT KABUPATEN ASAHAN. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 810–823.

- Pratama, D. A. (2023). Potensi dan Peran Kontribusi BMT Sidogiri Cabang Depok dalam Meningkatkan Produktivitas Bisnis Lokal. *Al Tasyree : Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 15(01), 18–28.
- Pudyastuti, E., Siregar, H., Purba, M. L., Yusditara, W., & Samosir, H. E. S. (2022). PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL MENENGAH. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(4), 459–465.
- Suaidah, & Arjun, D. (2023). Peran lembaga keuangan mikro dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat. *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 2(1), 75–83.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.)). Alfabeta.
- Susilawati, E. (2023). *PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NELAYAN DI KECAMATAN KEMPO, KABUPATEN DOMPU, NTB*. UIN Matara.
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan Di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 109–124.
- Yogasnumurti, R. R., Hafizh, M., Zain, T. S., & Yuvita, H. (2023). Upaya pengentasan kemiskinan melalui lembaga keuangan syariah di Provinsi Sumatera Selatan. *El-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 83–94.